

**KEWENANGAN PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KABUPATEN
BARRU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Skripsi

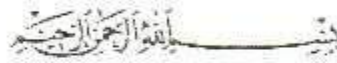
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Prodi Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

AKBAR TAMRIN
NIM. 10200114132

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar Tamrin
Nim : 10200114132
Tempat/Tgl. Lahir : Barru, 28 April 1993
Jur/Prodi/Konsentrasi : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Perumahan Bumi Zarindah, Pattalassang-Gowa.
Judul : **Kewenangan Pelayanan Publik Pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Barru Perspektif Hukum Islam.**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 24 Oktober 2018

Penyusun

AKBAR TAMRIN
NIM : 10200114132

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Kewenangan Pelayanan Publik Pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Barru Perspektif Hukum Islam", yang disusun oleh Akbar Tamrin, NIM: 10200114132, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin, tanggal 19 November 2018 M, bertepatan 11 Rabiul Awal 1440 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan dengan beberapa perbaikan.

Samata, 23 November 2018 M

15 Rabiul Awi 1440 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
Sekretaris	: Dra. Nila Sastrawati, M. Si
Munaqisy I	: Drs. H. M. Gazali Suyuti, M. Hi
Munaqisy II	: Hj. Rahmianti, S. Pd, M. Pd
Pembimbing I	: Dr. Karniati, S. Ag, M. Hi
Pembimbing II	: Dr. Musyikah Ilyas, S. Hi, M. Hi

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, M. Ag

Nip: 19621016 199003 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING/ PENGUJI

Pembimbing penulisan skripsi saudara **AKBAR TAMRIN**, NIM: 10200114132, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, **"KEWENANGAN PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KABUPATEN BARRU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**. Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian Munaqasyah (Akhir).

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, 5 November 2018

Pembimbing I



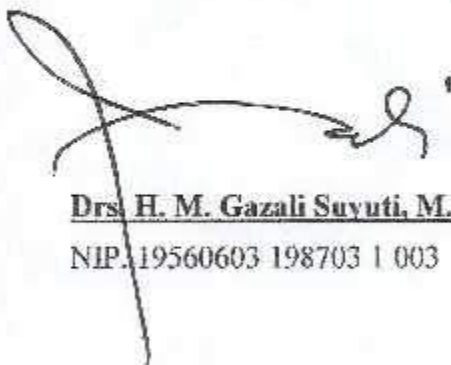
Dr. Kurniati, S. Ag, M.Hi
Nip. 19740627 200604 2 002

Pembimbing II



Dr. Musyfilah Ilyas, S.Hi, M.Hi
Nip. 19820118 201411 2 002

Penguji I



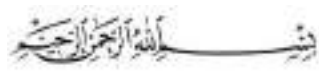
Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.Hi
NIP. 19560603 198703 1 003

Penguji II



Hj. Rahmiati, S.Pd, M.Pd
NIP. 19771005 200901 2 005

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil Alamiin. Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., atas berkat dan rahmat-Nya skripsi yang merupakan tugas akhir dari perkuliahan ini dapat penyusun rampungkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (SI) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Dengan rampungnya skripsi ini, besar harapan penyusun agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Ucapan maaf dan terima kasih yang tidak terhingga atas partisipasi para pihak yang telah berjasa membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Teruntuk kepada kedua orang tua saya ayahanda **Tamrin** dan ibunda **Rawiah** sebagai motivator terbesar yang tidak hentinya bekerja keras dan berdoa demi kelanjutan studi putranya.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir Pabbabari** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Bapak **Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin**, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
3. Ibu **Dra. Nila Sastrawati, M.Si**, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Ibu **Dr. Kurniati, M.Hi**, selaku sekretaris jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, yang senantiasa memberikan bimbingan dan dukungan selama masa studi.
5. Ibu **Dr. Kurniati, M.Hi**, selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir Penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, saran dan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini.
6. Ibu **Dr. Musyifah Ilyas, S.Hi. M.Hi**, selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, saran, motivasi dan dukungan selama masa studi.
7. Bapak **Drs. H. M. Gazali Sayuti, M.Hi, M.Hi** selaku Dosen penguji I yang memberikan kritik dan saran dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Ibu **Hj. Rahmiati, S.Pd., M.Pd**, selaku Dosen Penguji II yang memberikan kritik dan saran dalam penyusunan tugas akhir ini.
9. Seluruh dosen dan staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
10. Bapak **Drs. Nasaruddin, M.Si** selaku Kepala Kepala Dinas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Barru. yang telah memberi informasi dan data yang diperlukan melakukan penelitian serta berbagi ilmu sekaligus memberikan motivasi kepada penulis.
11. Bapak **Ir. Abdu Sami** yang masing-masing selaku Bidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera yang telah memberikan informasi yang di perlukan.

12. Untuk saudara saya **Ilham, S.Pd, Ridwan dan Rahmawiah** yang selalu siap membantu saya dan selalu mendorong saya untuk tetap semangat.
13. Serta Terima Kasih kepada Keluarga besar saya **Tante, Sepupu, Nenek** semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatudi Barru yang tak henti-hentinya memberikan support, Do'a serta dukungan dan bantuan baik materi maupun non materi.
14. Teman dekat saya **Umi Kalsum**. Yang tak henti-hentinya selalu memberikan support, Do'a, bantuan berupa materi maupun non materi serta selalu mendukung mulai dari SMK sampai di bangku perkuliahan.
15. **Rahmatilla, S.Pd**. Yang selalu memberika semangat dan support untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. **M. Syukur, Dharmawangsa, Rezky arsita, Nurfadillah M, Irmayanti Kadir** teman kelas yang menjadi teman seperjuangan selama perkuliahan serta menjadi kawan selama merantau.
17. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 terkhusus **HPK C 2014** dan teman-teman yang lain yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu.
18. Teman-Teman seperjuangan selama KKN angkatan 58 Kabupaten Gowa, Kecamatan Manuju dan terkhusus kepada teman-teman posko Desa Tamalatea, **Erna sulistadewi, Nirwana Ningsi, Fitriani, Wulandari, Muh. Yamin, Muh. Arif, Subhan, Hasdi**.

19. Terima kasih kepada segenap orang-orang yang telah mengambil bagian dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak sempat dituliskan namanya. Terima kasih sebesar-besarnya. Jerih payah kalian sangat berarti.

Demikian yang dapat penyusun sampaikan. Besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apa bila dalam penulisan ini terdapat banyak ketidak sempurnaan. Olehnya, penyusun menerima kritik dan saran pembaca sebagai acuan penulis agar lebih baik lagi di penulisan selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Gowa, 24 Oktober 2018

Penyusun


AKBAR TAMRIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITE	xi
ABSTRAK	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1-12
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Puataka	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN TEORETIS	13-34
A. Pengertian Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.....	12
B. Pengertian Kewenangan	21
C. Pelayanan publik	24
D. Peraturan Tentang Pelayanan Publik	27
E. Hukum Islam tentang pelayanan publik	30
BAB III METODE PENELITIAN	35-39
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber Data.....	36
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Instrumen Penelitian	37
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN 40-68

- A. Gambara Umum Lokasi Penelitian 40
- B. Kewenangan Pelayanan Publik Pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Barru 46
- C. Tinjauan hukum Islam Terhadap Kewenangan Pada Pelayanan Publik Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Barru 55

BAB V PENUTUP 69-71

- A. Kesimpulan 69
- B. Implikasi Penelitian 70

DAFTAR PUSTAKA 71-72

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah</i> dan yā'	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau yā'	ā	a dan garis di atas

ى	<i>kasrah danyā'</i>	i	i dan garis di atas
و	<i>ḍammahdan wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ *al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal

nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).



ABSTRAK

Nama : Akbar Tamrin
Nim : 10200114132
JudulSkripsi : Kewenangan Pelayanan Publik Pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Barru Perspektif Hukum Islam

Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Kewenangan Pelayanan Publik Pada Badan Keluarga Berencana Di Kabupaten Barru Perspektif Hukum Islam” yang dibagi dalam beberapa sub masalah yaitu: 1). Bagaimana kewenangan pelayanan publik pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Barru 2). Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kewenangan pada pelayanan publik Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Barru?

Penelitian ini termasuk penelitian *Field Research Kualitatif* atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan syar’i untuk mengetahui Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Perempuan. Hasil penelitian ini diperoleh dari data primer melalui observasi dan wawancara langsung dengan narasumber yaitu pihak pegawai dan Masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan di bidang Keluarga Berencana (KB) dan program yang berkaitan dengan kesehatan seperti pelayanan pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja, pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan program BKBPP berwenang menyediakan Alat dan obat-obatan dan Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan melaksanakan program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan memberikan atau membagikan alat kontrasepsi dan menganjurkan keluarga untuk mengkonsumsi pil KB untuk mengatur angka kelahiran anak. Kewenangan pelayanan publik pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perspektif Hukum Islam sangat dianjurkan demi kemaslahatan masyarakat dan pemahaman kebutuhan untuk memberikan kepuasan dan pemanfaatan berbagai prasarana.

Implikasi Kepada pemerintah Kabupaten Barru sebaiknya segera bertindak atau memberikan masukan dalam membantu Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Barru di bidang pelayanan publik, karena persoalan di bidang pelayanan publik tidak hanya terbatas pada kerja sama instansi, akan tetapi termasuk juga bantuan dana dari anggaran pendapatan belanja daerah dan kepada masyarakat agar kira memperhatikan laju pertumbuhan kelahiran anak agar tercipta keluarga yang sejahtera dan bahagia.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintah. Pelayanan publik sebagai indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan baik jika pelayanan publik yang dilakukan berorientasi pada kepentingan masyarakat. pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi kepuasan kepada masyarakat, karena masyarakat secara langsung menilai terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. Indikator kepuasan masyarakat itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah.

Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undang bagi setiap warga dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.¹

Dengan telah dilaksanakannya otonomi secara utuh sejak tahun 2001, maka berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang peraturan daerah diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang-bidang yang berdasar Undang-Undang telah ditetapkan sebagai kewenangan pusat.² Keleluasaan otonomi ini mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan

¹Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 21.

²HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 41

pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Pembagian Urusan diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 38 tahun 2007 Tentang pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana pada dasarnya seluruh kewenangan ada di Daerah, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Secara rinci pembagian kewenangan antara Pusat dan Provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan kewenangan Kabupaten/Kota adalah seluruh kewenangan di luar yang telah menjadi kewenangan Pusat dan Provinsi.³ Kewenangan Pusat di luar 5 kewenangan yang tidak diserahkan adalah kewenangan yang bersifat perencanaan makro, penetapan pedoman, norma, kriteria, dan standar. Sementara kewenangan Provinsi adalah yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan.

Dengan desentralisasi ini, maka secara umum hal-hal yang berkaitan dengan stabilisasi dan distribusi dilakukan oleh Pemerintah yang tingkatannya lebih tinggi (Pemerintah Pusat), sementara fungsi alokasi akan lebih banyak dilaksanakan oleh Daerah, karena Daerah lebih dekat kepada masyarakat sehingga dapat diketahui prioritas dan kebutuhan masyarakat setempat.

Terkait dengan penyelenggaraan Keluarga Berencana Nasional, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk melakukan penetapan kebijakan pengendalian angka kelahiran

³HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, h. 164.

dan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak, serta kewenangan untuk menetapkan pedoman pengembangan kualitas keluarga. Terlihat jelas di sini bahwa yang masih termasuk sebagai kewenangan Pusat (yang akan dilaksanakan oleh BKKBN secara langsung) adalah kewenangan yang sifatnya makro seperti perencanaan, penetapan kebijakan nasional, dan pedoman. Sementara kewenangan selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, merupakan kewenangan Daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Pasal 43 disebutkan bahwa BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Pertumbuhan penduduk saat ini merupakan isu yang sangat populer dan mencemaskan negara-negara di dunia. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan terutama peningkatan mutu kehidupan atau kualitas sumberdaya manusia. Fenomena ini diistilahkan oleh para ahli dengan istilah lonjakan penduduk (*population explosion* atau *population bomb*).

Isu lonjakan penduduk juga menjadi perhatian Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan data Badan jumlah penduduk di Indonesia dalam sensus pada tahun 2010 yaitu 237.641.326 jiwa, dimana angka pertumbuhan sebesar 3,5 juta jiwa setiap tahunnya. Jumlah penduduk yang sangat besar dan kurang seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan tentu akan menjadi suatu permasalahan yang besar bagi Indonesia di masa mendatang.⁴

⁴www.tribunnews.com. *Pertumbuhan penduduk 5 tahun lebih cepat/25/09/2010/* (4 Desember 2017)

Sebagai upaya penanggulangan masalah kependudukan, pemerintah Indonesia telah mencanangkan dan melaksanakan berbagai program kependudukan dan keluarga berencana. Upaya nyata tersebut diwujudkan dengan ditetapkan suatu peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Melalui lembaga tersebut, diharapkan mejadi salah satu alat untuk mengatasi kekhawatiran atas tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia.

Lembaga pemerintahan non kementerian ini terus berupaya melakukan tindakan guna mewujudkan misi yaitu mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan pada setiap masyarakat serta mewujudkan keluarga Indonesia sebagai keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan dan kampanye-kampanye kepada seluruh masyarakat.

BKKBN pernah sukses dengan slogan “dua anak cukup, laki-laki dan perempuan sama saja”. Namun, berbagai pihak menganggap bahwa slogan ini cukup melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, BKKBN terus berupaya mencari alternatif agar program keluarga berencana dilakukan oleh setiap masyarakat Indonesia. BKKBN juga terus melakukan inovasi guna mewujudkan visi untuk menyeimbangkan laju pertumbuhan penduduk pada 2017 Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai populasi pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Menurut data dari [Tribunnews.com](http://tribunnews.com) Indonesia berada pada posisi ke empat jumlah penduduk terbanyak di dunia, dengan jumlah penduduknya sebanyak 257.516.167 juta jiwa dengan luas kurang lebih 1.904.562 km².⁵ Dengan jumlah penduduk yang semakin besar ini tentu membawa tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan kesempatan kerja,

⁵Jateng.tribunnews.com. *jumlah penduduk indonesia*/02/08/2017/ (4 Desember 2017)

menghilangkan kemiskinan, meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan, meningkatkan infrastruktur, dan pelayanan publik. Dari hasil data di atas pemerintah Indonesia harus melakukan tindakan agar dapat meminimalisir jumlah pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, dan salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu memaksimalkan peranan Badan atau instansi yang kompeten dalam menangani masalah pertumbuhan penduduk.

Didalam proses meminimalisir pertumbuhan penduduk harus dilakukan dengan beberapa tahap-tahap yang sudah di desain sedemikian baiknya agar pada saat melaksanakan proses tersebut dapat berjalan dengan baik, karena setiap saat pertumbuhan penduduk dapat berubah-ubah, maka dari itu pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya atau perbandingan populasi yang dapat dihitung sebagai perubahan jumlah individu dalam suatu populasi. Salah satu hal yang dapat dilakukan pemerintah ialah memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat atau ajakan-ajakan yang dapat merubah pola pikir masyarakat tentang perlunya meminimalisir jumlah pertumbuhan penduduk, dan untuk menunjang keberhasilan proses ini peran aktif masyarakat juga sangat diperlukan, karena apabila masyarakat hanya menjadi pendengar saja tanpa ada respon yang dilakukan, semuanya hanya akan menjadi suatu yang tidak berarti dan boleh dikatakan tidak ada manfaat yang dapat mereka peroleh.

Namun dalam pelaksanaannya masih sering terjadi hambatan-hambatan dalam menjalankan program ini. Hal ini disebabkan oleh hal-hal teknis dan non teknis yang dapat mempengaruhi misalnya, kurangnya kemampuan dalam mengemban dan menjalankan tugasnya serta penyediaan fasilitas yang terbatas. Hal ini sangat berkaitan erat dengan proses untuk meminimalisir pertumbuhan penduduk yang ada di Negara kita baik dalam skala nasional maupun di tingkat

daerah, bertolak dari hal itu dapat dijadikan suatu tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan proses pertumbuhan penduduk. Dari hasil pemaparan beberapa masalah tersebut diatas terjadi latar belakang penelitian dan dengan mengacu pada hasil observasi yang sudah ada sebelumnya maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Kewenangan Pelayanan Publik Pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Barru Perspektif Hukum Islam”**

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus mengenai kewenangan pelayanan publik pada badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan (BKBPP) di kabupaten barru perspektif Hukum Islam.

2. Deskripsi fokus penelitian

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan beberapa pengertian variable yang di anggap penting yaitu:

- a. Kewenangan (Authority) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan bisa dihubungkan dengan kekuasaan.⁶
- b. Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dengan membatasi kelahiran, dengan kata lain KB adalah

⁶Evi Fitriyan Aulia.” *Kekuasaan dan Kewenangan*”.<https://www.kompasiana.com/22/01/2014/> (6 Desember 2017).

perencanaan jumlah keluarga pembatasan bisa dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi.⁷

- c. Pemberdayaan perempuan (women empowerment) adalah sebuah proses tranformasi relasi kuasa gender yang bersifat dari bawa ke atas (botton up) baik secara individual maupun kelompok karena perkembangannya kesadaran akan perempuan dan terbangunnya kemampuan untuk memghadapinya.⁸
- d. Pelayanan publik merupakan pemberian layanan yang biberikan kepada warga Negara secara baik dan professional baik saja, barang atau administrative sebagai bagian dari keperluan masyarakat.⁹
- e. Hukum Islam adalah nama bagi segala ketentuan Allah dan utusan-Nya yang menagandung larangan, pilihan, atau menyatakan syarat,sebab, dan halangan untuk suatu perbuatan hukum.¹⁰

Fokus Penelitian	Deskripsi Pokus
Kewenangan	Kewenangan (Authority) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan bisa dihubungkan dengan kekuasaan
Keluarga Berencana	Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dengan membatasi kelahiran, dengan kata lain KB adalah perencanaan jumlah keluarga

⁷Hartato Hanafi, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, h. 45

⁸Ferderika, "Pemberdayaan Perempuan". Genderpedia.blogspot.com.2010/08/16/"(6 Desember 2017).

⁹Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 22.

¹⁰Shomad ABD, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010), h. 29.

	pembatasan bisa dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi.
Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan perempuan (women empowerment) adalah sebuah proses tranformasi relasi kuasa gender yang bersifat dari bawa ke atas (botton up) baik secara individual maupun kelompok karena perkembangannya kesadaran akan perempuan dan terbangunnya kemampuan untuk memghadapinya.
Pelayanan Publik	Pelayanan publik merupakan pemberian layanan yang biberikan kepada warga Negara secara baik dan professional baik saja, barang atau administrative sebagai bagian dari keperluan masyarakat
Hukum Islam	Hukum Islam adalah nama bagi segala ketentuan Allah dan utusan-Nya yang menagandung larangan, pilihan, atau menyatakan syarat,sebab, dan halangan untuk suatu perbuatan hukum

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penulisan Skripsi ini adalah bagaimana Kewenangan Pelayanan Publik Pada Badan Keluarag Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Barru Perspektif Hukum Islam dengan sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan pelayanan publik pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Barru?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kewenangan pada pelayanan publik Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Barru?

D. Kajian Pustaka

1. AG.Subarsono, dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik. adapun isi buku ini Perumusan Masalah Kebijakan salah satu dari analisis kebijakan yang kurang mendapat perhatian selama ini tetapi bersifat krusial adalah perumusan masalah kebijakan. Analisis kebijakan sering gagal karena mereka menemukan solusi yang salah terhadap masalah yang benar. Gejala yang pertama lebih disebabkan karena subyektivitas atau kepentingan analisis atau *policy makers* sangat menonjol, sedangkan gejala kedua lebih disebabkan karena kompleksitas masalah itu sendiri dan kemampuan *policy makers*.¹¹ Di dalam buku ini hanya membahas bagaimana pemecahan masalah yang salah tetapi tidak memberikan solusi yang benar. Buku ini juga tidak berfokus mengenai bagaimana masalah yang ada di desa.
2. Ari Sulistyawati, dalam bukunya pelayanan keluarga berencana. Adapun isi buku ini konsep kependudukan dan program KB di Indonesia pembangunan bukan sekedar perkara pemasok modal dan teknologi saja tetapi juga membutuhkan suatu yang mampu mengembangkan sarana yang berorientasi pada masa sekarang dan masa depan, memiliki kemampuan untuk merencanakan, dan percaya bahwa manusia dapat mengubah

¹¹AG.Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 25.

alam, bukan sebaliknya teori Alex Inkeles dan David Smith.¹² Namun dalam buku ini tidak menjelaskan bagaimana pertumbuhan yang baik bagi setiap masyarakat dan dalam buku ini juga tidak menjelaskan bagaimana perlindungan mulai dari kehamilan sampai melahirkan.

3. Hayat, dalam bukunya manajemen pelayanan publik. Adapun isi buku ini konsep, fungsi dan tujuan pelayanan publik yaitu kepentingan kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan adalah hal yang mutlak dilakukan oleh penyelenggara pelayanan. Bukan siapa yang melakukan, tetapi siapa yang membutuhkan. Sehingga dengan demikian pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dapat dilakukan secara optimal.¹³ Dalam buku ini tidak menjelaskan sebagaimana pelayanan publik yang baik dan memberikan kepuasan terhadap masyarakat atas pelayanan tersebut. Buku ini juga tidak sesuai dengan undang-undang jika pelayanan sesuai dengan undang-undang maka masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Buku ini hanya menjelaskan bagaimana kepentingan publik.
4. Muhammad Iqbal dalam bukunya hukum islam indonesia modern, dinamika hukum islam yang terjadi di dunia islam juga berpengaruh terhadap perkembangan dan dinamika hukum islam di Indonesia, dalam dinamika ini terdapat tiga kecenderungan pemikiran hukum islam yaitu kelompok tradisional, modernis dan salafi¹⁴. Dengan buku ini masih bertentangan dengan ketiga kecenderungan pemikiran islam oleh karena itu masih perlu pengkajian yang lebih sehingga ada pemikiran islam yang disetujui di indonesia.

¹²Ari Sulistyawati, *Pelayanan Keluarga Berencanan*, h. 13

¹³Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik*, h. 27

¹⁴Iqbal Muhammada, *Hukum Islam Indonesia Modern*, h. 19

5. Ratminto, Manajemen Pelayanan dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh swasta adaptabilitas pelayanan sangatlah tinggi penyelenggaraan pelayanan selalu berusaha untuk merespon keinginan pengguna karena posisi tawar pengguna yang Sangat tinggi.¹⁵ apabila keinginan pengguna tidak direspon maka pengguna akan beralih kepada penyelenggaraan pelayanan yang lain jelas sekali bahwa di dalam kantor ada pengguna kontrol pihak yang menggunakan dengan demikian ada sifat pelayanan adalah pelayanan yang dikendalikan oleh pengguna.

E. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian

1. Tinjauan penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan tujuan yaitu:

- a) Untuk mengetahui bagaimanakah kewenangan pelayanan publik pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Barru.
- b) Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap kewenangan pada pelayanan publik Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Barru.

2. Kegunaan Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoretis Memberikan suatu wacana yang diharapkan dapat digunakan oleh almamater sebagai pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya khususnya dalam Hukum Tata

¹⁵Ratminto, *Pelayanan Publik*, h. 11.

NegaraBermanfaat bagi penulis dalam bidang Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman mengenai kewenangan BKB dan PP di bidang pelayanan publik.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

1. Pengertian Badan Keluarga Berencana

Badan keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi. Program keluarga berencana suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk, maka dari itu program keluarga berencana ini diharapkan menerima norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang.

Beberapa pendapat ahli tentang pengertian keluarga berencana antara lain:

- a. Menurut H.S.M. Nasruddin Latief keluarga berencana adalah suatu ikhtiar usaha manusiawi yang disengaja untuk mengatur jejak kehamilan didalam keluarga secara tidak melawan hukum agama, undang-undang negara dan moral pancasila, kesejahteraan bangsa dan negara pada umumnya.¹⁶
- b. Menurut Bisri Musthofa, Keluarga berencana adalah merencanakan mengatur jumlah dalam keluarga yang disukai atau karena terlalu sering isterinya melahirkan sehingga perlu mengadakan pembatasan.¹⁷
- c. Menurut Mukti Ali, Keluarga berencana adalah sebagai upaya ikhtiar untuk memberikan jaminan kesehatan, untuk sang anak

¹⁶Nasiruddin Latif, *Keluarga Berencana di Pandang Dari Sudut Hukum Islam* (Jakarta: BKKBN, 2001), h. 205

¹⁷Basri Musthofa, *Islam Dalam Keluarga Berencana* (Jakarta: Bina Pustaka, 2003), h. 36

maupun ibu, jaminan pendidikan, karena pendidikan merupakan bekal yang sangat berharga untuk kehidupan kelak dalam masyarakat, untuk memenuhi kesejahteraan dan kemakmuran keluarga lahir dan batin.¹⁸

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan keluarga berencana mengandung pengertian:

1. Untuk mengatur besar kecilnya jumlah anak
2. Mengatur kehamilan agar terjadi pada waktu yang ditentukan
3. Dengan cara individual, maksudnya keluarga berencana dilakukan atas persetujuan suami isteri untuk menentukan jumlah anak tanpa ada paksa dari pihak manapun.
4. Pembatasan kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi
5. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam keluarga.
6. Merupakan usaha yang disengaja dalam melakukan/menjalankan keluarga berencana atas inisiatif sendiri dari isteri.

Dilakukan harus ada sebab-sebab yang mendorong, antara lain untuk menjaga kesehatan ibu karena seringnya melahirkan maka akan mengganggu beban yang sangat berat baik fisik maupun mental. Maksud dari pada keluarga berencana itu sendiri sebagai suatu usaha yang disengaja untuk mengatur masalah kependudukan, sedangkan penduduk merupakan unsur penting bagi negara, tanpa adanya penduduk tidak mungkin adanya sebuah negara. Dalam suatu negara program pembangunan yang dilaksanakan tidak seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk, sehingga menimbulkan permasalahan dari bergai aspek dalam kehidupan yang merupakan titik sentral dari pada pembangunan.

¹⁸Mukti Ali, *Keluarga Berencana dan Kependudukan* (Jakarta: Biro Aksara, 1991), h. 309

2. Pemberdayaan Perempuan

Realitas ketidakadilan bagi kaum perempuan mulai dari marginalisasi, makhluk tuhan, separuh harga laki-laki, sebagai pembantu, tergantung pada laki-laki dan bahkan sering diperlakukan dengan kasar atau setengah budak. Seakan memposisikan perempuan sebagai kelompok masyarakat kelas dua, yang berimbas pada berkurangnya hak-hak perempuan termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan. Kondisi perempuan di Indonesia dalam bidang pendidikan relatif masih sangat rendah dibandingkan laki-laki. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin sedikit jumlah perempuan yang mengenyamnya.¹⁹

Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada 4 level yang berbeda, yakni keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Konsep pemberdayaan dapat dipahami dalam 2 konteks pertama, kekuasaan dalam proses pembuatan keputusan dengan titik tekkan pada pentingnya peran perempuan. Kedua, pemberdayaan perempuan dan akibatnya pada laki-laki di masyarakat yang beragam.²⁰

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata *power* artinya keberdayaan atau kekuasaan. Pemberdayaan adalah suatu dengan cara nama seseorang, rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan nama orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.²¹

¹⁹Isma Salman, *Keluarga Sakina Dalam Aisyiyah* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), h. 181

²⁰Zakiyah, *Pemberdayaan Perempuan Oleh Lajnah Wanita* (Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan XVII 01: Januari- Juni 2010), h. 44

²¹Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial* (Cet.I.Bandung: Mizan, 2003), h. 35

Pemberdayaan di definisikan sebagai proses dimana pihak yang tidak berdaya bisa mendapatkan kontrol yang lebih banyak terhadap kondisi yang lebih banyak terhadap kondisi atau keadaan dalam kehidupannya yang meliputi kontrol terhadap berbagai sumber (mencakup fisik dan intelektual) dan ideologi meliputi (keyakinan, nilai, dan pemikiran). Jadi pemberdayaan perempuan adalah usaha mengalokasikan kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya.

Adapun pemberdayaan terhadap perempuan adalah salah satu cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik di domain publik maupun domestik. Hal tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan cara:²²

1. Membongkar mitos perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga
2. Memberi beragam keterampilan bagi kaum perempuan sehingga kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki.
3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin

3. Pengertian Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut

²²Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan*, h. 59

sebagai "*blote match*"²³ sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.²⁴

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.²⁵ Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi

²³ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan* (Surabaya: Universitas Airlangga, 1990), h. 30.

²⁴ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 52.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Makalah*, (Surabaya: Universitas Airlangga), Tampa Tahun, h. 1

(*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheic*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.²⁶ Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk

²⁶Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab Jurnal Pro Justisia Edisi IV* (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), h. 22.

menimbulkan akibat hukum. sedangkan Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah “

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undangundang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undangundang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi baik secara atribusi, delegasi, maupun mandat.

Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Mengenai atribusi, J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Sedangkan

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁷

1. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan

²⁷Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, h. 5.

demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.²⁸

B. Pelayanan Publik

1. Definisi Pelayanan Publik

Definisi Pelayanan Publik Pelayanan publik atau pelayanan umum adalah segala bentuk jasa layanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan badan usaha milik negara dan usaha milik daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang.²⁹ Sedangkan definisi pelayanan publik yang lain adalah memberikan layanan (melayani) kepada orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan³⁰.

Pelayanan publik oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara). Apalagi saat ini

²⁸F.A.M.Stroink, dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Cet.2. Bandung:Citra Aditya Bakti, 2006), h. 219.

²⁹Raminto, *Manajemen Pelayanan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 4

³⁰Sinambella, *Reformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 5

masyarakat semakin sadar apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengontrol apa yang dilakukan pemerintahannya.

Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Etika publik memang terkait langsung dengan pelayanan publik, terutama masalah integrasi publik yang harus dilakukan oleh pejabat publik. Pelayanan publik sangat diperlukan tanggung jawab dan integritas pribadi sebagai petugas publik, sehingga mampu menjalankan tugasnya secara akuntabilitas dan transparansi.³¹

2. Fungsi Pelayanan Publik

Setiap instansi pemerintah yang menerapkan pelayanan publik secara baik dan berkualitas dipengaruhi oleh konsepsi dasar yang dibangun dengan reformasi birokrasi menuju tata kelola dan sistem pengelolaan yang profesional. Profesionalitas kinerja dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing, mempunyai implikasi yang positif terhadap kualitas kerja. Kualitas

³¹Ramli Muhammad, *Manajemen Pelayanan Publik Berbasis Kemanusiaan* (Cet.III; Alauddin University Press, 2015), h. 51

kinerja dengan kemampuan dan soft skill yang dimiliki setiap aparatur, berpengaruh secara komprehensif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.³²

Dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik pada pasal 2 disebutkan bahwa pelayanan publik yang dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan publik. Kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam penerima pelayanan publik. Masyarakat mempunyai hak untuk menerima pelayanan secara baik dan berkualitas, dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, tepat waktu, dan baik.

Kepastian hukum yang dimaksud untuk menjamin kebutuhan masyarakat akan terpenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku dalam pelayanan publik. Dan pelayanan publik sesungguhnya untuk masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pelayanan publik menjadi kewajiban bagi aparatur untuk melayani.

3. Tujuan Pelayanan Publik

Aspek yang menjadi dasar dalam pelayanan publik adalah melayani masyarakat sebaik-baiknya dalam rangka membantu terkait dengan urusan administrasi pemerintahan dan/ atau kebutuhan barang atau jasa publik. Pelayanan publik yang baik tentunya, tentunya menjadi harapan penting bagi masyarakat, mulai dari sikap aparatur yang memberikan pelayanan, bentuk pelayanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, sampai kepada perilaku aparaturnya, tujuan pelayanan publik semata-mata untuk kepentingan masyarakat yang menerima pelayanan. jika pelayannya baik masyarakat akan mera puas atas diterimanya pelayanan yang diberikan. Kepuasan masyarakat menjadi acuan baik atau buruknya pelayanan publik, dalam pelayanan harus benar-benar memberikan kepuasan kepada masyarakat.

³²Hayat, *Manajemen Pelayanan Pelayanan Publik*, h. 50

Pasal 3 undang-undang nomor 25 tahun 2009 menyebutkan bahwa tujuan pelayanan publik antara lain:

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintah dan korporasi yang baik.
- c. Terwujudnya penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undang; dan
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggara pelayanan publik.³³

Penekanan dalam pasal ini adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menerima pelayanan. Dengan mewujudkan prinsip-prinsip pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undang, memberikan konsekuensi hukum kepada siapa yang memberikan pelayanan kepada siapa yang menerima pelayanan. Hak dan kewajiban masyarakat dan aparatur dalam penyelenggara pelayanan publik menjadi koridor yang membatasi dan menagatur jalannya pelayanan publik tersebut.

C. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKB dan PP)

Keluarga berencana menurut kamus besar bahasa indonesia (1997), maksud daripada ini adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dengan membatasi kelahiran, dengan kata lain KB adalah perencanaan jumlah keluarga pembatasan bisa dilakukan dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi

³³Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik*, h. 52

atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD (intra uterine devices). KB merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali.³⁴

Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri memiliki anak yang ideal, berwawasan kedepan bertanggung jawab, harmonis. Program keluarga berencana nasional merupakan salah satu program dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk. Salah satu pokok dalam program keluarga berencanaan nasional adalah menghimpun dan mengajak segenap potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil bahagia sejahtera dalam dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia indonesia.³⁵

Usaha pemerintah dalam menghadapi kependudukan salah satunya adalah keluarga berencanaan. Visi program keluarga berencanaan nasional telah di ubah mewujudkan keluarga yang berkualitas tahun 2015. keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis.³⁶ Program keluarga berencana nasional merupakan salah satu program dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk. Salah satu pokok dalam program keluarga berencana nasional adalah menghimpun dan mengajak segenap potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil bahagia sejahtera dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia indonesia. Cara yang digunakan untuk mewujudkan norma keluarga kecil bahagia

³⁴Hartato Hanafi, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), h. 46.

³⁵Prawirohardjo, Sarwono, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi* (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2006), h. 37.

³⁶Saifuddin Abdul Bahri, *Buku Pandua Praktis Pelayanan Kontrasepsi* (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2003), h. 55.

sejahtera yaitu mengatur jarak kelahiran anak dengan menggunakan alat kontrasepsi.³⁷

Badan dari pemerintah yang mengurus program keluarga berencana adalah BKKBN. Badan ini mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, BKKBN menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan nasional dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- b. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- c. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- d. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- e. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- f. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitas di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk mengerem laju pertumbuhan penduduk di era otonomi daerah, tahun ini pelaksanaan desentralisasi kewenangan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) harus tuntas. Meski peran BKKBN membantu meningkatkan kesejahteraan warga cukup dominan, kenyataan di daerah

³⁷Prawiroharjo Sarwono, *Buku panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, h. 67.

menunjukkan, lembaga itu kurang diminati. Bisa jadi daerah pertama di Indonesia yang mengakomodasi penyerahan kewenangan BKKBN, sekaligus menempatkannya dalam posisi strategis. Jauh sebelum pusat menggembar-gemborkan pentingnya desentralisasi kebijakan KB, Kabupaten Pinrang telah menerbitkan Perda Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan, Termasuk perubahan BKKBN menjadi Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (Dinas KB dan PP).

Salah satu instansi penyedia pelayanan yang masih dipertanyakan kualitas pelayanannya adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Terutama yang disorot dalam pelaksanaannya adalah program Keluarga Berencana yang berfungsi menekan laju pertumbuhan. Setelah program KB yang semula dipegang oleh BKKBN ini melebur untuk tingkat kota dan kabupaten, yang mana itu sendiri pelaksanaannya dijalankan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, mulai muncul semacam keraguan apakah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dapat meneruskan tren positif pelaksanaan program KB.

D. Peraturan Tentang Pelayanan Publik

Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam pasal 1 ayat (1) bahwa pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dipertegas pula dalam ayat 7, bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai

kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Dari uraian dalam UU no.25/2009 tersebut diatas memberikan penegasan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. taitu pelayanan yang baik, mudah, murah, cepat dan terukur adalah amanah yang harus dilakukan oleh penyelenggara pelayanan dalam pemberian pelayanan. Hal itu sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam pelayanan publik.

Pasal 5 UU No.25/2009 menyebutkan, bahwa ruang lingkup pelayanan administratif yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian pelayanan dalam ruang lingkup tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah secara baik, akuntabel dan maksimal, sehingga kepuasan masyarakat dalam penerimaan pelayanan dapat terpenuhi. Pelayanan publik tidak hanya memberikan pelayanan secara fisik, tetapi sikap, perilaku dan penerimaan dari aparatur pemberi layanan menjadi titik penting dalam pelayanan publik. Kepuasan masyarakat tidak hanya bertumpu pada cepatnya pelayanan, mudahnya pelayanan, dan lain sebagainya, tetapi pada aspek kebaikan dan etika dalam pemberian pelayanan. Dalam UU tersebut juga menjelaskan bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau, dan terukur.³⁸

Ruang lingkup pelayanan publik dalam bidang jasa seperti dalam ayat 2 pasal 5 menyebutkan bahwa pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat

³⁸Hayat, *Manajemen Pelayanan publik*, h. 24

tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Sementara pelayanan barang publik seperti yang tercantum dalam pasal 5 ayat (3), yaitu meliputi:

- a. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau yang seluruhnya dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
- b. Pengadaan dan penyaluran barang milik publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/ atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau dan/ atau kekayaan daerah yang dipisahkan.³⁹

Sementara itu, pada aspek pelayanan jasa publik, diatur dalam ayat (4) yaitu:

- a. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran daerah

³⁹Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik*, h 25

- b. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagai atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara dan/ atau kekayaan daerah yang dipisahkan;
- c. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagai suatu atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/ atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, pelayanan publik dalam aspek administratifnya, diatur dalam ayat (7) yaitu:

- a. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur oleh perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.
- b. Tindakan administratif oleh instansi non pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

E. Hukum Islam Tentang Pelayanan Publik

Hukum islam merupakan rangkaian dari kata “Hukum” dan kata “Islam”.⁴⁰ hakikat hukum islam adalah hukum agama, hukum islam tidak dapat dipisahkan dari agama islam. Hukum islam adalah samawi, artinya hukum agama yang menerima wahyu, yaitu kitab suci Alquran, hukum islam mengatur hubungan

⁴⁰Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 4

pribadi, masyarakat, negara dan sebagainya, dan akhirnya juga mengatur hubungan manusia dengan tuhan.⁴¹

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan dari *al-fiqiyah al-islamiy* atau dalam konteks tertentu disebut *al-syariah al-islamiy*. Hukum Islam mencakup berbagai dimensi, dimensi abstrak dalam wujud segala perintah dan larangan Allah swt dan Rasulnya. Dimensi konkrit dalam wujud perilaku menpola di kalangan orang Islam sebagai upaya untuk melaksanakan tita Allah swt dan Rasulnya. Di samping itu, hukum Islam menekankan perbuatan mukallaf baik berupa tuntutan, pilihan maupun larangan,

Islam sebagai suatu agama merupakan sistem akidah, syariah, dan ahklak,. nilai-nilai Islam antara lain adalah persamaan derajat anatar manusia, semangat persaudaraan, tanggung jawab, orientasi pada kebaikan, keadilan, kejujuran, amanah, pengabdian/ibadah, keikhlasan, kebersihan, mendahulukan melaksanakan kewajiban, memberikan pertolongan, berakhlak mulia, prinsip toleransi, musyawarah, dan kedamaian.⁴²

Jauh-jauh sebelumnya Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat Islam (bukan saja kepada ummatb islam) untuk senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas sebagai firman Allah SWT QS Al- Baqarah/2: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

⁴¹Somad Abdul, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 2010), h.1

⁴²Rachmad Muhammad, *Manajemen Pelayanan Publik Dalam Perspektif Hukum Islam* (UIN Sultan Kasim Riau, tanpa judul), h. 157

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁴³

Apabila kita tarik ranah pelayanan, maka ayat tersebut dapat bermakna bahwa parah petugas pelayan, hendak melayani dan memperlakukan seseorang dengan baik sebagaimana kita memperlakukan dirinya sendiri. jika melayani, maka sejatinya adalah memberikan pelayanan/ pengabdian secara profesional dan proporsional. Bentuk dan cara pelayanan juga merupakan bagian dari makna yang tidak terpisahkan dari pelayanan itu sendiri. Pelayanan berarti melayani dengan bersungguh-sungguh kepada orang yang dilayani untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan dalam rangka memberikan kepuasan dan kemanfaatan

QS Al- Imran/3: 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahan:

kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.⁴⁴

Kamu wahai seluruh ummat muhammad dari generasi ke genesari berikutnya, sejak dahulu dalam pengetahuan Allah adalah ummat yang terbaik

⁴³Kementrian Agama RI," *Al-Qur'an Terjemahan*" (Bandung : PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 56.

⁴⁴Kementrian Agama RI," *Al-Qur'an Terjemahan*" (Bandung : PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 80

karena adanya sifat-sifat yang menghiasi diri kalian, ummat yang dikeluarkan yakni diwujudkan dan di tempatkan untuk manusia seluruhnya sejak adam tanpa bosan menyuruh kepada yang ma'ruf yakni apa yang dinilai baik oleh masyarakat islam sejalan dengan nilai-nilai luhur, dan karena kalian beriman kepada Allah dengan iman yang benar sehingga atas dasarnya kalian percaya dan mengamalkan tuntunannya dan tuntunan rasul-Nya, serta melakukan amar ma'ruf dan Nabi mungkar itu sesuai dengan cara dan kandungan yang diajarkannya. Inilah yang menjadikan kalian meraih kebijakan, tapi jangan juga Allah pilih kasih sebab sekiranya Ahl al-Kitab, yakni orang yahudi dan Nasrani, tentulah itu banyak juga bagi bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman sebagai iman kalian, sehingga dengan demikian merekapun meraih kebijakan itu dan menjadi pula bagian dari sebaik-baik ummat, tetapi jumlah mereka tidak banyak, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, yakni keluar dari ketaatan kepada tuntunan-tuntunan Allah SWT.

Ayat di atas menggunakan kata *ummat* kata ini digunakan unruk menunjuk semua” kelompok yang dihimpun oleh sesuatu”. Seperti agama yang sama, waktu atau tempat yang sama, baik penghimpunannyasecara terpaksa, maupun atas kehendak mereka. Dengan demikian, ayat ini menyebutkan tiga syarat yang harus dipenuhi untuk meraih kedudukan sebagai sebaik-baik ummat, yaitu amar ma'ruf, nabi mungkar, dan persatuan dalam berpegang teguh pada tali/ ajaran Allah. Karena itu “ siapa yang ingin meraih keistimewaan ini, hendaklah dia memenuhi syarat yang ditetapkan Allah itu”. Demikian Umar Ibn AL-Khathtab sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Jabir.⁴⁵

Di dalam hidup ini, kita tidak perlu berupaya untuk menjadi seorang yang disegani, apalagi ditakuti, tetapi jadilah orang yang berguna bagi siapapun di sekeliling dari kita, kita wujudkan jiwa kepemimpinan dalam diri kita, agar diri kita bisa menjadi seseorang yang menginspirasi orang lain, sebab ini salah satu perintah Rasulullah SAW kepada ummatnya. Sabda beliau:

⁴⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah - Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Cet. 2: Semarang; PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), h. 173-174.

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ⁴⁶

Artinya:

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”(HR. Ath-Thabrani)

Menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Seorang muslim lebih diperintahkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain, bukan hanya mencari manfaat dari orang atau memanfaatkan orang lain.



⁴⁶Imam Ath-Thabrani, *Al Mu'jam Al-Kabir* (Cet.2; Jakarta; Pustaka Azzam, 2008), h. 58

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi merupakan sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen spesifikasinya adalah bentuk, tugas, metode, teknik dan alat. penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.⁴⁷ Dengan demikian, metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu.

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif, menurut Creswell (1998), penelitian kualitatif adalah sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian ini bersifat deskriptif penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.⁴⁸

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Barru.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan

⁴⁷Sumadi suryabrata, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: CV.Rajawali, 1985), h. 65

⁴⁸Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Hukum: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 34

menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan melalui *library research*

C. Sumber Data.

Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer dan skunder

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan di kantor BKBPP dengan cara-cara seperti *interview* yaitu berarti kegiatan terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kewenangan badak keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan (BKBPP) di bidang pelayanan publik di kabupaten barru.

2. Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui *Library research* dengan jalan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatapapan langsung dengan responden, sama seperti

penggunaan daftar pertanyaan.⁴⁹ Oleh karena itu peneliti menggunakan metode ini karena dianggap lebih efektif dalam memperoleh data.

2. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto.⁵⁰

3. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁵¹ Penggunaan metode observasi dalam penelitian di atas mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang dilakukan secara langsung dengan mengamati objek. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Pada observasi ini penulis akan menggunakannya dengan maksud untuk mendapatkan data yang efektif mengenai kewenangan badak keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan (BKBPP) di bidang pelayanan publik.

E. *Instrument penelitian*

Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan peneliti yang selanjutnya terjun kelapangan. Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut:

⁴⁹Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 143.

⁵⁰Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 141.

⁵¹Husnaini, Uaman Poernomo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 54.

Peneliti sebagai instrument utama

a. Pedoman wawancara

Pedoman Wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.

b. Buku catatan dan pulpen

Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan menulis semua percakapan dengan sumber data.

c. Kamera

Kamera yaitu alat berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah: Editing data

Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui *relevansi* (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keragu-raguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.

2. Coding data

Coding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak dan Administrasi Wilayah

Kabupaten Barru merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang mempunyai wilayah yang terbentang di selat Makassar, membujur dari arah selatan ke utara sepanjang kurang lebih 78 Km. Berdasarkan pembagian wilayah administratif, Kabupaten Barru terbagi atas 7 wilayah Kecamatan dan 54 wilayah Desa/Kelurahan yaitu :

- a. Mallusetasi yang memiliki luas wilayah 216 Km², berikut yang termasuk ke dalam Desa/Kelurahan adalah :
 1. Cilellang dengan luas 14 km²
 2. Manuba dengan luas 37 km²
 3. Palanro dengan luas 4 Km²
 4. Nepo dengan luas 95 Km²
 5. Mallawa dengan luas 7 Km²
 6. Kupa dengan luas 20 Km²
 7. Bojo dengan luas 20 Km²
 8. Bojo Baru dengan luas 19 Km²
- b. Soppeng Riaja yang memiliki luas wilayah 79 Km², berikut yang termasuk ke dalam Desa/Kelurahan adalah :
 1. Ajakkang dengan luas 23 Km²
 2. Paccekke dengan luas 24 Km²
 3. Kiru-kiru dengan luas 7 Km²
 4. Mangkoso dengan luas 2 Km²
 5. Lawallu dengan luas 6 Km²

6. Siddo dengan luas 8 Km^2
 7. Batu Pute dengan luas 6 Km^2
- c. Balusu yang memiliki luas wilayah 112 Km^2 , berikut yang termasuk ke dalam Desa/Kelurahan adalah :
1. Binuang dengan luas 8 Km^2
 2. Madello dengan luas 12 Km^2
 3. Takkalasi dengan luas 14 Km^2
 4. Kamiri dengan luas 47 Km^2
 5. Balusu dengan luas 23 Km^2
 6. Lampoko dengan luas 8 Km^2
- d. Barru yang memiliki luas wilayah $199,32 \text{ Km}^2$, berikut yang termasuk ke dalam Desa/Kelurahan adalah :
1. Sumpang Binangae dengan luas 2 Km^2
 2. Coppo dengan luas 27 Km^2
 3. Tuwung dengan luas 12 Km^2
 4. Ana Banua dengan luas 20 Km^2
 5. Palakka dengan luas 36 Km^2
 6. Galung dengan luas 29 Km^2
 7. Tompo dengan luas 35 Km^2
 8. Seppe'e dengan luas 16 Km^2
 9. Mangempang dengan luas 14 Km^2
 10. Siawung dengan luas 8 Km^2
- e. Tanete Rilau yang memiliki luas wilayah 79 Km^2 , berikut yang termasuk ke dalam Desa/Kelurahan adalah :
1. Lasita e dengan luas 8 Km^2
 2. Pancana dengan luas 9 Km^2

3. Lalabata dengan luas 12 Km^2
 4. Corawali dengan luas 8 Km^2
 5. Pao-Pao dengan luas 9 Km^2
 6. Tellumpanua dengan luas 7 Km^2
 7. Lalolang dengan luas 2 Km^2
 8. Tanete dengan luas 4 Km^2
 9. Lipukasi dengan luas 15 Km^2
 10. Garessi dengan luas 5 Km^2
- f. Tanete Riaja yang memiliki luas wilayah 174 Km^2 , berikut yang termasuk ke dalam Desa/Kelurahan adalah :
1. Mattirowalie dengan luas 26 Km^2
 2. Harapan dengan luas 53 Km^2
 3. Lompo Riaja dengan luas 21 Km^2
 4. Libureng dengan luas 20 Km^2
 5. Kading dengan luas 23 Km^2
 6. Lompo Tengah dengan luas 13 Km^2
 7. Lempang dengan luas 18 Km^2
- g. Pujananting yang memiliki luas wilayah 315 Km^2 , berikut yang termasuk ke dalam Desa/Kelurahan adalah :
1. Bulu-Bulu dengan luas 37 Km^2
 2. Gattareng dengan luas 50 Km^2
 3. Pujananting dengan luas 78 Km^2
 4. Jangan-jangan dengan luas 41 Km^2
 5. Pattapa dengan luas 78 Km^2
 6. Bacu-bacu 31 Km^2

2. Kondisi Geografis Wilayah

Kabupaten Barru secara geografis terletak pada koordinat 4 5' 49" sampai 4 47' 35" Lintang selatan dan 119 35' 0" samapai 119 45' 16" Bujur Timur. Berdasarkan data badan statistik Kabupaten Barru mempunyai luas Wilayah sekitar 1.174 Km² sedangkan berdasarkan hasil perhitungan spasial, Kabupaten Barru memiliki luas 1.182 Km² dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kota Pare Pare
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar

Kabupaten Barru mempunyai wilayah yang cukup bervariasi terdiri dari daerah Pesisir/Laut, dataran rendah dan dataran tinggi. Di bagian timur Kabupaten Barru terbentang daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 100-1000 m diatas permukaan laut, sedangkan bagian barat yang berhadapan selat Makassar, bertopografi datar sampai landai dengan ketinggian 0-20 m diatas permukaan laut.

3. Iklim

Berdasarkan klasifikasi iklim yang di susun berdasarkan jumlah bulan basah dan bulan kering, Kabupaten Barru termasuk ke dalam zona agroklimat C2, dimana periode bulan basah (curah hujan lebih dari 200 mm/bulan) berturut turut selama 5-6 bulan dan bulan kering (curah hujan kurang dari 100 mm/bulan) berturut turut selama 3-4 bulan. Curah hujan bulanan tertinggi pada bulan Desember sampai Januari, sedangkan curah hujan bulanan terendah adalah bulan Agustus sampai September.

4. Kondisi Sosial Ekonomi

Kegiatan perekonomian dan pemerintahan terpusat di Kecamatan Barru yang merupakan Ibu Kota Kabupaten, kondisi tersebut menjadikan Kecamatan Barru sebagai pusat aktivitas dan pusat pertumbuhan Kabupaten, aktivitas ekonomi yang menonjol di kabupaten Barru umumnya bergerak di sektor pertanian (khususnya di sektor pangan). Kegiatan pertanian khususnya disektor tanaman pangan tersebut di dukung dengan pembangunan infrastruktur pendukung berupa jaringan irigasi dan jalan.

Jaringan irigasi di harapkan dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian, sedangkan jaringan jalan di harapkan dapat membuka dan mempermudah akses ke sentra-sentra produksi pertanian, sehingga memudahkan hasil pertanian. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani, kegiatan bercocok tanam merupakan kegiatan yang telah di lakukan secara turun temurun dan membudayakan di masyarakat. Bahkan penduduk yang bermata pencaharian utama sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pedagang dan usaha lainnya menjadikan kegiatan bertani sebagai kerjaan sampingan.

5. Visi dan Misi

a. Visi

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dan mengacu pada visi yang telah disampaikan oleh Bupati/Wakil Bupati hasil pemilihan kepala daerah tahun 2015 maka Visi Kabupaten Barru Tahun 2016-2021, adalah : ***“Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan”***

b. Misi

1. Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme SDM

Kemajuan pembangunan di lakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan melalui pembangunan bidang ekonomi, sosial, politik, dan keagamaan dengan tetap memperhatikan asas pembangunann yang berkelanjutan dan berkeadilan

2. Mengoptimalakn pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat

Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme SDM melalui peningkatan kualitas sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan keagamaan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Barru

3. Menciptakan lingkungan yang kondusif

Pembangunan Kabupaten Barru yang berdaya saing dan kemandirian daerah dilakukan melalui pembangunan infrastuktur sosial, ekonomi dan fisik, pembangunan inovasi daerah, ketahanan pangan, ketahanann energi dan investasi daerah

4. Mengembangkan interkoneksi sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional dan internasional

Menciptakan lingkungan yang kondusif melalui peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan penguatan perundang-undang, agama, norma budaya/adat istiadat

5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Government)

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik senantiasa menggunakan prinsip antara lain transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien yang di dukung oleh aparaturnya yang profesional.

B. Kewenangan Pelayanan Publik Pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Barru

Adapun kewenangan Pelayanan Publik pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Barru antara lain:

- a. Program Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana (KB).
- b. Program Pelayanan Pusat Informasi dan Konseling, Kesehatan Reproduksi Remaja.
- c. Program Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
- d. Program Bina Keluarga Balita (BKB).
- e. Program pelayanan kontrasepsi dan KB⁵²

Dalam program pelayanan Kontrasepsi dan KB Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai kewenangan menyediakan alat kontrasepsi, pil KB dan bekerja sama dengan instansi lain yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Barru untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkeluarga untuk pengendalian angka kelahiran bayi atau anak.

Program Pelayanan Pusat Informasi dan Konseling, Kesehatan Reproduksi Remaja dalam pelayanan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi

⁵²Hasaruddin (48 Tahun) Kepala Dinas, Wawancara Barru 26 Agustus 2018.

Remaja (PIK-KRR), Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai kewenangan memperkenalkan keberadaan PIK-KRR (Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja) kepada semua pihak terkait (*stakeholders*) dalam rangka memperluas akses dan pengembangan dukungan dan jaringan PIK-KRR dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, camat dan kepala desa/lurah.

Program Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Dalam rangka pelaksanaan program KIE dan KRR, BKBPP kabupaten Barru melaksanakan advokasi, promosi, KIE konseling dan pelayanan KRR melalui kelompok kegiatan mass media, maupun melalui pusat informasi dan konsultasi (PIK-KRR) oleh karena itu petugas BKKBN atau BKBPP menganjurkan kepada Kepala, Dinas/Badan/Kantor pengelola Program KB memperbanyak dan menyebarluaskan ke kelompok kegiatan binaan BKKBN, oleh karena itu kita dapat melihat BKKBN atau BKBPP bekerjasama antara instansi-instansi pemerintah dalam pelayanan ini.

Program Bina Keluarga Balita. Gerakan Program Bina Keluarga Balita yang lahir dari prakarsa Menteri Negara Peranan Wanita, dalam pelaksanaan operasionalnya bekerjasama dengan sektor-sektor dan LSM terkait, merupakan salah satu upaya yang berkontribusi dalam pemberdayaan orang tua (Ayah dan Ibu) sebagai pendidik pertama dan utama dari generasi penerus bangsa dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas.

Adapun instansi yang terkait dengan berjalannya Kewenangan program kerja BKKBN atau BKBPP dalam hal pelayanan publik di kabupaten Barru adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan. Bentuk kerjasama BKKBN atau BKBPP dengan Dinas Kependudukan adalah Mengendalikan Laju pertumbuhan penduduk sehingga tidak terjadi kepadatan penduduk di kabupaten

Barru, jadi secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut adalah atribusi sebagai mana yang di jelaskan diatas bahwa kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Sedangkan bentuk kerjasama BKKBN dengan Dinas Kesehatan adalah di bidang Keluarga Berencana (KB) dan program-program lainnya yang menyangkut dengan Kesehatan dan Keluarga Berencana, dalam hal ini BKKBN atau BKBPP berwenang menyediakan Alat dan obat-obatan dan Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan melaksanakan program kerja yang di laksanakan oleh BKKBN atau BKB dan PP dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan memberikan atau membagikan alat kontrasepsi dan menganjurkan keluarga untuk mengkonsumsi pil KB untuk mengatur angka kelahiran anak.⁵³

Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Barru sebagai instansi pemerintah yang senantiasa memberikan pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Barru. Kualitas pelayanan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di ketahui dari lima dimensi yang terdiri dari bukti fisik (*tagible*), kehandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), serta empati (*empathy*). Dengan dimensi-dimensi pelayanan tersebut Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Barru harus memberikan pelayanan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Aspek Bukti Fisik (*Tangible*)

Bukti fisik (*tangible*) merupakan aspek dalam memberikan kemampuan suatu perusahaan/instansi dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak internal. Kebutuhan pelanggan dari aspek bukti fisik yang berfokus pada kondisi

⁵³Hasaruddin (48 Tahun) Kepala Dinas Wawancara Barru 26 Agustus 2018.

ruang meliputi: kebersihan, kerapian, kenyamanan ruang, penyediaan tempat parkir untuk masyarakat, kelengkapan peralatan serta sarana komunikasi.

Hasil penelitian yang saya lakukan mengenai fasilitas fisik di gedung balai kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terlihat sangat besar dan nyaman untuk mengadakan pertemuan antar kader-kader setiap Desa begitu juga dengan tempat duduk yang disediakan sangatlah banyak dan rapi selain itu juga terdapat tempat parkir yang luas dan aman.⁵⁴

Pada dasarnya pelayanan yang berkualitas secara umum dapat diartikan sebagai pelayanan yang benar-benar memberikan kepuasan kepada masyarakat, dalam arti masyarakat benar-benar dilayani secara santun dan profesional. Aspek kondisi Fisik merupakan salah satu indikator yang menunjukkan suatu pelayanan yang berkualitas. Harapan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas dari pemberi layanan, salah satunya dalam hal bukti fisik/fasilitas fisik dalam menggunakan jasa. Fasilitas fisik merupakan daya tarik tersendiri dan akan mendorong kepuasan pelanggan. Apabila masyarakat menggunakan pelayanan yang baik, maka instansi tersebut telah mampu memberikan pelayanan yang baik pula, fasilitas fisik tersebut meliputi lokasi gedung, tata ruang, kenyamanan ruang serta penampilan petugas.

1. Aspek Keandalan(*Reliability*)

Keandalan (*reliability*) merupakan penyelesaian pelayanan yang berfokus pada kendala petugas dalam mengenai setiap keluhan masyarakat, ketetapan dan kecepatan waktu penyelesaian pelayanan kepada masyarakat. proses pelayanan dan melayani tidak membedakan status sosial budaya, agama semuanya akan dilayani dengan kemudahan dan rasa perhatian yang sama.

⁵⁴Nurjanna (45 Tahun) Masyarakat Kabupaten Barru, Wawancara Barru 30 Agustus 2018.

Waktu pelayanan yang ditetapkan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terhadap masyarakat di Kabupaten Barru yaitu mulai hari Senin-Jumat. Untuk waktu penyuluhan para kader tiap desa setiap satu bulan sekali bertempat di balai kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. adanya kendala petugas, keamanan, serta kecepatan dan ketepatan waktu dalam menangani setiap keluhan masyarakat mengenai KB akan menjadikan pelayanan itu berkualitas dan dapat memberikan dampak positif bagi citra suatu instansi.⁵⁵ Jika masyarakat merasakan pelayanan dengan terpercaya disuatu kantor pemerintah khususnya dalam bidang pelayanan mengenai kesehatan maka akan menimbulkan kepuasan serta loyalitas dalam menggunakan jasa tersebut.

Kehandala petugas untuk menangani setiap keluhan masyarakat, keakuratan produk-produk alat kontrasepsi serta ketepatan dan kecepatan waktu penyelesaian pelayanan kepada masyarakat dalam proses pelayanan sangatlah diperlukan karena dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa. Apabila masyarakat merasakan pelayanan yang diberikan sesuai dengan dijanjikan, maka lembaga tersebut telah mampu memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap pelangganya.⁵⁶

Dari hasil penelitian terungkap bahwa masyarakat Kabupaten Barru merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam aspek kehandalan, mengenai kehandalan dalam menangani keluhan masyarakat handal dalam segi waktu dan ketepatan proses pelayanan, program-program KB beserta alat kontrasepsi. Petugas melayani dengan ramah memberikan pelayanan tidak membedakan antara orang satu

⁵⁵Jamaluddin (47 Tahun) Sekretaris, *Wawancara* Barru 26 Agustus 2018.

⁵⁶Abdul Sami (53 Tahun) Seksi Badan Keluarga Berencan, *Wawancara* Barru 26 Agustus 2018.

dengan orang lain, bahkan mereka sudah menganggap kami sebagai keluarga tidak ada jarak antara masyarakat dengan petugas⁵⁷

Pelayanan publik yang dilakukan ditinjau dari aspek kehandalan (*Reliability*) sudah memenuhi aspek dimensi kualitas pelayanan, karena sudah memiliki kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang di janjikan dengan cepat. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yaitu agar batas dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Menjalankan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undang dan memberika perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Aspek Daya Tanggap (*responsiveness*)

Aspek daya tanggap yang diberikan oleh suatu kantor pelayanan terhadap masyarakat yaitu dengan memberikan respon yang baik, cepat dan tanggap dalam menanggapi setiap keluhan masyarakat serta memberika pelayanan yang maksimal khususnya dalam pelayanan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, hal ini akan menimbulkan rasa puas kepada masyarakat sebagai pengguna jasa.⁵⁸

Daya tanggap/respon yang diberikan oleh seorang petugas suatu kantor untuk membantu pelanggan (masyarakat) dan memberika jasa dengan tanggap sangatlah penting. Bersedia membantu dan cepat menaggapi setiap keluhan masyarakat memberikan dampak positif terhadap nama baik kantor tersebut.

⁵⁷Jawariah (44 Tahun) Masyarakat Kabupaten Barru, Wawancara Barru 30 Agustus 2018.

⁵⁸St. Rosmini (51 tahun) Seksi Pemberdayaan Perempuan, Wawancara Barru 26 Agustus 2018.

Mengenai respon yang diberikan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terhadap keluhan-keluhan masyarakat menyatakan bahwa Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan selalu siap dan sigap dalam memberikan solusi masalah untuk setiap keluhan masyarakat. Misalnya masyarakat yang gagal menggunakan alat kontrasepsi mereka akan bertanggung jawab dan membawa orang tersebut ke puskesmas setempat.⁵⁹

3. Aspek Jaminan (*Assurance*)

Menyelesaikan proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat diwujudkan dengan kemudahan memperoleh informasi secara akurat dan jelas, serta kemudahan dalam mendapatkan jaminan, hal tersebut akan menimbulkan rasa percaya terhadap masyarakat untuk menggunakan jasa lainnya.

Jaminan yang diberikan petugas seperti memudahkan prosedur pemasangan alat kontrasepsi yang memiliki keterampilan dan keahlian khusus, pengetahuan cukup luas, sikap ramah dan sopan pada saat penyuluhan. Dari hasil penelitian terungkap bahwa masyarakat merasa puas dan senang dalam menggunakan jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa jaminan yang diberikan sesuai dengan salah satu dimensi pelayanan dalam segi assurance (jaminan) keamanan serta keahlian khusus suatu kantor memberi jasa yang diberikan untuk memuaskan masyarakat adalah menunjukkan adanya efektivitas pelayanan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Barru.⁶⁰

Penyelenggaraan pelayanan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dilakukan dengan mengutamakan agar dapat

⁵⁹Nurjanna (45 Tahun) Masyarakat Kabupaten Barru, *Wawancara Barru* 30 Agustus 2018

⁶⁰Jawariah (44 Tahun) Masyarakat Kabupaten Barru, *Wawancara Barru* 30 Agustus 2018.

terselenggara secara efektif dan efisien. Oleh karena itu baik masyarakat yang menerima layanan maupun petugas yang memberikan pelayanan harus memahami prosedur yang berlaku.

4. Aspek Empati (*Empathy*)

Aspek empati yang harus diberikan oleh suatu kantor pemerintah terhadap masyarakat yaitu dengan memahami keinginan-keinginan masyarakat sebagai pengguna jasa, memberikan perhatian secara pribadi dan memberikan kesan yang menyenangkan kepada masyarakat. Hal ini akan menimbulkan rasa puas kepada masyarakat selaku penanggung jasa.

Empati yang diberikan oleh para petugas pelayanan yaitu berkaitan dengan perhatian petugas kepada masyarakat dengan memberikan kesan yang ramah dan menyenangkan dalam melakukan pelayanan serta selalu memahami keinginan masyarakat memperhatikan setiap keinginan masyarakat, Masyarakat merupakan salah satu dasar pelayanan yang harus dimengerti oleh pemberi layanan. Hal ini sesuai dasar-dasar pelayanan antara lain sebagai berikut:⁶¹

- a. Memusatkan perhatian kepada pelanggan (masyarakat)
 1. Mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dibicarakan pelanggan, dan jangan sekali-kali memotong pembicaraan
 2. Memperhatikan sikap tubuh anda, bertindak secara tenang dan rileks
 3. Menatap mata pelanggan pada saat berbicara dan tersenyum, sehingga tatapan mata anda menjadi teduh dan menyejukkan hati yang memandang

⁶¹Hasaruddin (48 Tahun) Kepala Dinas, Wawancara Barru 26 Agustus 2018.

4. Memperhatikan ekspresi wajah anda dan selalu tampilkan senyum anda.

b. Memberikan pelayanan yang efisien.

Cara yang dapat dilaksanakan antara lain:

1. Melayani pelanggan berikutnya segera selesai dengan yang satu
2. Menggunakan waktu seakurat mungkin
3. Berbicara seperlunya dengan pelanggan
4. Merencanakan apa yang berikutnya akan dilakukan
5. Menindaklanjuti pelayanan sampai tuntas
6. Meninggalkan perasaan harga diri tamu

Cara yang dapat dilakukan:

1. Mengenali kehadiran pelanggan dengan segera
2. Selalu mempergunakan nama pelanggan sesering mungkin
3. Memuji dengan tulus dan memberikan penghargaan kepada pelanggan
4. Memperlakukan setiap pelanggan sebagai orang dewasa
5. Membina hubungan baik dengan pelanggan

Dari hasil penelitian bahwa pelayanan yang diberikan sangatlah memuaskan para petugas selalu memberikan perhatian penuh terhadap masyarakat bertanggung jawab terhadap segala keluhan masyarakat, hal ini sudah sesuai dengan aspek empati dalam pelayanan publik.⁶²

⁶²Jawariah (44 Tahun) Masyarakat Kabupaten Barru, Wawancara Barru 30 Agustus 2018.

***C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Pada Pelayanan Publik
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten
Barru***

Secara universal, manusia adalah makhluk Allah yang memiliki potensi kemakhlukan yang paling bagus, mulia, pandai, dan cerdas. Manusia mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan dan mengembangkan titah-titah amanatNya serta memperoleh kasih sayangNya yang sempurna. Sebagai wujud kesempurnaannya, manusia diciptakan oleh Allah setidaknya memiliki dua tugas dan tanggung jawab besar. Pertama, sebagai seorang hamba yang berkewajiban untuk memperbanyak ibadah kepadaNya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap Tuhan yang telah menciptakannya. Kedua, sebagai khalifah yang memiliki jabatan sebagai pengganti Allah dalam mengurus seluruh alam. Dengan kata lain, manusia sebagai khalifah berkewajiban untuk menciptakan kedamaian, melakukan perbaikan, dan tidak membuat kerusakan, baik untuk dirinya maupun untuk makhluk yang lain.⁶³

Setiap manusia yang ada di muka bumi ini pasti memiliki wewenang atau bahkan diberikan kewenangan terhadap sesuatu hal yang telah menjadi pekerjaannya. Manusia yang telah diberikan kewenangan tersebut harus mampu memenuhi hak dan kewajibannya serta bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan tersebut. Kewenangan yang telah diberikan kepada seseorang tersebut, yang dimana berisi tugas dan tanggung jawab merupakan amanat ketuhanan yang sangat besar dan berat. Oleh karena itu, semua yang ada di langit dan di bumi menolak amanat yang sebelumnya telah Allah SWT tawarkan kepada mereka. Akan tetapi, manusia berani menerima amanat tersebut, padahal ia memiliki

⁶³Rachmat Ramadana Al-Banjari, *Prophetic Leadership* (Yogyakarta: DIVA Perss: 2008), h. 21

potensi untuk mengingkarinya seperti firman Allah SWT dalam QS Al-Ahzab/33: 72.:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
تَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Terjemahan:

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh, Yang dimaksud dengan amanat di sini ialah tugas-tugas keagamaan.⁶⁴

Ibn ‘Abbas sebagaimana dikutip oleh Ibn Kasir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang di maksud dengan amanat pada ayat di atas adalah ketaatan dan penghambaan atau ketekunan beribadah. Ada juga yang memaknai kata amanah sebagai pembebanan, karena orang yang tidak sanggup memenuhinya berarti membuat utang atas dirinya. Adapun orang yang melaksanakannya akan memperoleh kemuliaan.⁶⁵

Sungguh benarlah ucapan Rasulullah SAW, jika amanat telah di sia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Amanah yang paling pertama dan utama bagi manusia ialah amanah ketaatan kepada Allah, pencipta, pemilik, pemelihara dan penguasa alam semesta dengan segenap isinya. Apabila seseorang memiliki wewenang atau memiliki kewenangan terhadap sesuatu hal maka seseorang tersebut dengan kata lain merupakan seorang penguasa atau pemimpin, dia memiliki kuasa sesuai dengan apa yang di kehendakinya. Seorang pemimpin yang

⁶⁴Kementrian Agama RI, "Al-Qur'an Terjemahan" (Bandung : PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 604

⁶⁵Imad Al-Din Abu Al- Fida' Isma'il Ibn Kasir Al-Dimasyqi, *Tafsir A-l Qur'an Al-Azim* (Cet. XI, Kairo: Muassasah Qurtuba, 2000), h. 25

ada di muka bumi ini tentu saja akan mempertanggung jawabkan segalanya di dunia maupun di akhirat kelak, dan di akhirat tentu saja akan mempertanggung jawabkannya di hadapan Allah SWT .

Begitu berat dan besar tanggung jawab seorang pemimpin, pada hadist Rasulullah kembali mengulangi kalimat kullukum ra'in yang diawali dengan huruf peringatan (tanbih) yaitu sebagai bentuk isyarat yang mengingatkan setiap manusia untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan kepemimpinannya karena semua itu akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT.⁶⁶ Selanjutnya dalam salah satu ayat Al-qur'an, kemampuan dalam melaksanakan wewenang Allah SWT kepada Nabi Adam di simbolkan dengan kemampuan dalam mengeja nama-nama benda seluruhnya.

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bertanggung jawab. Disebut demikian karena manusia selain makhluk sosial juga makhluk tuhan. Manusia mempunyai tuntutan yang besar untuk bertanggung jawab mengingat ia mementaskan sejumlah peranan dalam konteks sosial ataupun teologis. Tanggung jawab timbul karena telah diterima wewenang. Seperti wewenang, tanggung jawab juga membentuk hubungan tertentu antara pemberi wewenang dan penerima wewenang. Jadi tanggung jawab seimbang dengan wewenang. Dengan demikian, kalau terjadi sesuatu maka seseorang yang dibebani tanggung jawab wajib menanggung segala sesuatunya, dan sebagai contoh adalah adanya kewenangan pelayanan publik pada kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang ada di Kabupaten Barru.

Konsep islam mengajarkan bahwa dalam memberikan pelayanan publik dari usaha yang di jalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan

⁶⁶Al-Asqalani Syihab Al-Din Abu Al-Fadl Ahmad Ibn' Ali Ibn Hajar, *Nuzhat Al- Nazr Syarh Nukhbah* (Jilid. XIII. Mesir Al-Munawwara Tampa Tahun), h. 113

yang buruk atau yang tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur' QS Al-Baqarah/2: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁶⁷

Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa ada kewajiban untuk menafkahkan hasil dari usaha yang kita lakukan yaitu berupa nafkah yang baik lagi bermanfaat yang dihasilkan dari kerja yang halal. Disamping itu, kita harus memilih harta atau hasil usaha yang baik agar barokah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Jika di kaitkan dengan pelayananpetugas pelayanan harus bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh agar bisa memberikan hasil yang maksimal.

Asbabul nuzul, ayat tersebut ialah seperti yang dikatakan Jabir, Nabi saw, memerintahkan zakat fitrah berupa satu sha' kurma. Lalu ada seorang laki-laki yang datang membawa kurma jelek, maka turunlah ayat Al-Qur'an , wahai orang-orang yang beriman , infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik hingga akhir hayat.⁶⁸

⁶⁷Kementrian Agama RI," *Al-Qur'an Terjemahan*" (Bandung : PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 56.

⁶⁸Wahbah, Az-Zuhaili, *Tafsir Al Wasith Alid I Al-Faatihha-At-Taubah* (Cet.I. Jakarta:Gema Insani, 2012), h. 140

Pendekatan deontologi didasarkan atas prinsip-prinsip moral yang harus ditegakkan karena kebenaran yang ada didalam dirinya dan tidak terkait dengan akibat atau konsekuensi dari keputusan atau tindakan yang telah dilakukan pendekatan ini berdasarkan dan berlandaskan pada nilai-nilai moral yang mengikat.

Islam merupakan agama yang diturunkan Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya. Islam yang sudah dipahami secara umum maknanya sejahtera. Ajaran islam menghendaki umat manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah dapat menjadikan dirinya sebagai khalifahnyanya. Artinya dimana setiap manusia yang beriman dan bertakwa kepadanya dapat memakmurkan bumi untuk mencari kebutuhan hidup.

Dalam ajaran Islam (syari'at) segala sesuatu yang kita kerjakan sesuai dengan tuntutan Al-qur'an dan sunnah adalah ibadah. Orang yang mencari kehidupan di dunia tidak boleh melupakan tuntutan akhirat. Allah SWT menghendaki umat manusia untuk mencari keseimbangan antara dunia dan akhirat. Manusia tidak boleh terputus antara kedua sisi tersebut, sehingga lahirlah kebahagiaan. Bekerja keraslah adalah tujuan untuk menghasilkan karya terbaik dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan hidup yang paling utama dituntut dalam bekerja adalah ikhlas. Kalau dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang baik sebagai pelayanan publik yang akan membawa keberkahan dalam hidup dan kehidupannya.

Segala pemberian yang diberikan Allah di dunia ini adalah amanah, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah pada hari hizab. Amanah itu juga dapat dikatakan sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan syariat islam. Setiap pelayanan yang telah diberikan baik administrasi maupun fungsional harus

berjalan dengan sebaik-baiknya. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan tidak terlepas dari kebersamaan dengan ikhlas. Tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan tidak ada batas kepentingan pribadi dan golongan.

Adapun amal perbuatan pelayanan publik sebagai ibadah adalah sangat tergantung dari niat. Niat sangat penting bagi seseorang dalam bekerja, apabila niatnya baik akan dicatat oleh Allah SWT walau sebesar biji zahrah apabila niatnya buruk akan dicatat juga walau sebesar zahrah. Sebagaimana Allah menyatakan dalam firmanNya QS Az-zalzalah/99: 7-8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ

Terjemahan:

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.⁶⁹

Niat yang di maksudkan dalam suatu pekerjaan adalah kata hati nurani. Jika seorang yang bekerja dengan baik berarti dia berada pada jalan yang benar jika dalam bekerja niatnya buruk berarti dia berada pada jalan yang mungkar. Barang siapa yang ingin kembali bertemu Allah SWT pada hari akhir nanti, maka dia harus bekerja dengan amalan shaleh dan tidak mempersekutunnya dengan sesuatu.

Dalam melayani masyarakat sebagai objek pekerja adalah dengan pelayanan publik. Pelayanan publik harusnya bisa bersifat prima yaitu, menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Untuk waktu yang telah ditentukan dilaksanakan dengan baik, tidak mengedepankan kepentingan pribadi dan

⁶⁹Kementrian Agama RI, "Al-Qur'an Terjemahan" (Bandung : PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 909

keluarga. Dengan adanya pelayanan publik yang bersifat prima maka akan dirasakan kenyamanan, ketertiban, keindahan, keserasian, dan tidak berbelit-belit. Akan tetapi, saat ini masih ada sebahagian masyarakat yang masih memiliki sifat arogansi dan matrealistis.⁷⁰

Tugas ini adalah sebagai tanggung jawab yang telah diberikan oleh pemerintah secara proporsional sehingga akan melahirkan manajemen yang sinergik bagi masyarakat secara luas. Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang ada di Kabupaten Barru telah dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Di sinilah kita dapat melihat pelayanan yang memuaskan bagi kepentingan masyarakat. Masyarakat tidak merasa di rugikan dalam menerima pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu contoh pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat adalah dengan memberikan sosialisasi tentang adanya serta pentingnya Keluarga Berencana (KB), di sini masyarakat akan diajak dan diberitahu bagaimana caranya agar memiliki keluarga yang sejahtera.

Dewasa ini banyak sekali masyarakat yang ingin memiliki keluarga yang sejahtera. Salah satu cara yang mereka tempuh itu dengan memperkecil jumlah anak sehingga mereka merasa cukup dan sejahtera dengan keluarga kecil mereka. Adapun faktor ekonomi yakni banyak masyarakat yang merasa jika banyak anak maka kebutuhan ekonomi mereka meningkat sehingga mereka harus bekerja keras lagi. Maka dari itu mulai muncul anggapan orang untuk melakukan program keluarga berencana yang memang merupakan salah satu program pemerintah.

Keluarga berencana merupakan suatu proses pengaturan kehamilan agar terciptanya suatu keluarga yang sejahtera. Adapun menurut Undang Nomor 52 Tahun 2009 pasal 1 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

⁷⁰Hassel Nogi, *Manajemen Publik* (Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia: 2005), h. 208

Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

Namun dalam islam , keluarga berencana menjadi persoalan yang polemik karena ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa keluarga berencana dilarang tetapi ada juga ayat al-qur'an yang mendukung program keluarga berencana. Dalam al-Qur'an dicantumkan beberapa ayat yang berkaitan dengan keluarga berencana , diantaranya firman Allah Swt. dalam QS an-Nisaa/4: 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.⁷¹

Ayat tersebut diatas menunjukan bahwa Islam mendukung adanya keluarga berencana karena dalam QS an-Nisaa ayat 9 dinyatakan bahwa “hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah”. Anak lemah yang dimaksud adalah generasi penerus yang lemah agama , ilmu , pengetahuan sehingga KB menjadi upaya agar mewujudkan keluarga yang sakinah.

⁷¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahan* (Cet. I. Nurul Ilmi Semesta:Bandung, 2013), h. 78.

Pandangan Hukum Islam tentang Keluarga Berencana, secara prinsipil dapat diterima oleh Islam, bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh sangat sejalan dengan tujuan syari`at Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Selain itu, KB juga memiliki sejumlah manfaat yang dapat mencegah timbulnya kemudharatan. Bila dilihat dari fungsi dan manfaat KB yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan maka tidak diragukan lagi kebolehan KB dalam Islam.

Para ulama yang membolehkan KB sepakat bahwa Keluarga Berencana (KB) yang dibolehkan syari`at adalah suatu usaha pengaturan/penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami-isteri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (maslahat) keluarga. Dengan demikian KB disini mempunyai arti sama dengan tanzim al nasl (pengaturan keturunan). Sejauh pengertiannya adalah tanzim al nasl (pengaturan keturunan), bukan tahdid al nasl (pembatasan keturunan) dalam arti pemandulan (taqim) dan aborsi (isqot al-haml), maka KB tidak dilarang. Kebolehan KB dalam batas pengertian diatas sudah banyak difatwakan, baik oleh individu ulama maupun lembaga-lembaga ke Islaman tingkat nasional dan internasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebolehan KB dengan pengertian batasan ini sudah hampir menjadi Ijma`Ulama. MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga telah mengeluarkan fatwa serupa dalam Musyawarah Nasional Ulama tentang Kependudukan, Kesehatan dan Pembangunan tahun 1983. Betapapun secara teoritis sudah banyak fatwa ulama yang membolehkan KB dalam arti tanzim al-nasl, tetapi kita harus tetap memperhatikan jenis dan cara kerja alat/metode kontrasepsi yang akan digunakan untuk ber-KB.⁷²

⁷²<http://www.stikesyarsi.ac.id/index.php/artikel-islam/102-pandangan-hukum-islam-tentang-keluarga-berencana-.html> (Diakses pada tanggal 13 Oktober 2018 Pukul 21.50 WIB)

1. Pandangan Al-Qur'an Tentang Keluarga Berencana

Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat yang memberikan petunjuk yang perlu kita laksanakan dalam kaitannya dengan KB diantaranya ialah :

a. QS al-Anfaal/8: 53;

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

Terjemahnya:

“(siksaan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan meubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”

b. QS at-Thalaaq/65: 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.⁷³

Dari ayat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa petunjuk yang perlu dilaksanakan dalam KB antara lain, menjaga kesehatan istri, mempertimbangkan

⁷³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahan* (Cet. I; Nurul Ilmi Semesta:Bandung, 2013), h. 560.

kepentingan anak, memperhitungkan biaya hidup rumah tangga. Tetapi dalam al-Qur'an ada ayat-ayat yang berindikasi tentang diperbolehkannya mengikuti program KB, yakni karena hal-hal berikut:

- a. Menghawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu
- b. Menghawatirkan keselamatan agama, akibat kesempitan penghidupan hal Keluarga Berencana Menurut Pandangan Ulama'
- a. Ulama' yang memperbolehkan

Diantara ulama' yang membolehkan adalah Imam al-Ghazali, Syaikh al-Hariri, Syaikh Syalthut, Ulama' yang membolehkan ini berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti program KB dengan ketentuan antara lain, untuk menjaga kesehatan si ibu, menghindari kesulitan ibu, untuk menjarangkan anak. Mereka juga berpendapat bahwa perencanaan keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan. Mereka mendasarkan pendapatnya pada surat al-Mu'minun ayat: 12, 13, 14.⁷⁴

- b. Ulama' yang melarang

Selain ulama' yang memperbolehkan ada para ulama' yang melarang diantaranya ialah Prof. Dr. Madkour, Abu A'la al-Maududi. Mereka melarang mengikuti KB karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan.

Selain hukum islam yang mendukung keluarga berencana, ada para ulama yang menafsirkan larangan keluarga berencana seperti yang tercantum dalam QS Al-An'am/6: 151:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِمْ ۖ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ إِنَّكُمْ مِّنْ إِمْلَاقِي نَحْنُ نَزَرُكُمْ ۖ

⁷⁴Abdurrahman Umran, *Islam dan KB* (Cet.I; PT Lentera Basritama:Jakarta, 1997),h. 99

وَأَيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا أَلْفَوْاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ



Terjemahnya:

‘Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)”.⁷⁵

Terlepas dari larangan untuk ber-KB, kita harus mengetahui dan memperhatikan jenis dan kerja alat kontrasepsi yang akan digunakan. Alat kontrasepsi yang diharamkan adalah yang sifatnya pemandulan. Vasektomi (sterilisasi bagi lelaki) berbeda dengan khitan lelaki dimana sebagian dari tubuhnya ada yang dipotong dan dihilangkan, yaitu kulup (qulfaḥ bhs. Arab, praeputium bahasa Latin) karena jika kulup yang menutupi kepala zakar (hasyafah/glans penis) tidak dipotong dan dihilangkan justru bisa menjadi sarang penyakit kelamin (venereal disease). Karena itu, khitan untuk laki-laki justru sangat dianjurkan. Tetapi kalau kondisi kesehatan isteri atau suami yang terpaksa seperti untuk menghindari penurunan penyakit dari bapak/ibu terhadap anak keturunannya yang bakal lahir atau terancamnya jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan bayi, maka sterilisasi dibolehkan oleh Islam karena dianggap dharurat. Hal ini diisyaratkan dalam kaidah:

⁷⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahan* (Cet. I; Nurul Ilmi Semesta: Bandung, 2013), h. 148.

Majlis Ulama Indonesia pun telah memfatwakan keharaman penggunaan KB sterilisasi ini pada tahun 1983 dengan alasan sterilisasi bisa mengakibatkan kemandulan tetap. Menurut Masjful Zuhdi bahwa hukum sterilisasi ini dibolehkan karena tidak membuat kemandulan selama-lamanya. Karena teknologi kedokteran semakin canggih dapat melakukan operasi penyambungan saluran telur wanita atau saluran pria yang telah disterilkan. Meskipun demikian, hendaknya dihindari bagi umat Islam untuk melakukan sterilisasi ini, karena ada banyak cara untuk menjaga jarak kehamilan.

Cara pencegahan kehamilan yang diperbolehkan oleh syara' antara lain, menggunakan pil, suntikan, spiral, kondom, diafragma, tablet vaginal, tissue. Cara ini diperbolehkan asal tidak membahayakan nyawa sang ibu. Pada intinya Keluarga berencana dalam pandangan Islam diperbolehkan apabila dilakukan dengan cara yang sesuai syariat Islam, dilakukan dalam konteks pengaturan keturunan bukan pembatasan keturunan dan dilakukan apabila dalam kondisi yang darurat yang dapat mengancam keselamatan masyarakat itu sendiri.⁷⁶

2. Cara KB yang Diperbolehkan dan Yang Dilarang oleh Islam

a. Cara yang diperbolehkan

Ada beberapa macam cara pencegahan kehamilan yang diperbolehkan oleh syara' antara lain, menggunakan pil, suntikan, spiral, kondom, diafragma, tablet vaginal, tissue. Cara ini diperbolehkan asal tidak membahayakan nyawa sang ibu.⁷⁷ Dan cara ini dapat dikategorikan kepada azl yang tidak dipermasalahkan hukumnya. Sebagaimana hadits Nabi :

⁷⁶<http://www.stikesyarsi.ac.id/index.php/artikel-islam/102-pandangan-hukum-islam-tentang-keluarga-berencana-.html> (Diakses pada tanggal 13 Oktober 2018 Pukul 21.50 WIB)

⁷⁷Abul Fadl Mohsin Ebrahim, Aborsi, *Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan* (Mizan: Bandung, 1997), h. 70

“Kami dahulu dizaman Nabi Muhammad Saw. melakukan azl, tetapi beliau tidak melarangnya”.

b. Cara yang dilarang

Ada juga cara pencegahan kehamilan yang dilarang oleh syara', yaitu dengan cara merubah atau merusak organ tubuh yang bersangkutan. Cara-cara yang termasuk kategori ini antara lain, vasektomi, tubektomi, aborsi. Hal ini tidak diperbolehkan karena hal ini menentang tujuan pernikahan untuk menghasilkan keturunan.⁷⁸

Alat kontrasepsi yang dibenarkan menurut Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan (man'u al-haml), bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat dipasang sendiri oleh yang bersangkutan atau oleh orang lain yang tidak haram memandang auratnya atau oleh orang lain yang pada dasarnya tidak boleh memandang auratnya tetapi dalam keadaan darurat ia dibolehkan. Selain itu bahan pembuatan yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal, serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan (mudlarat) bagi kesehatan.

Alat/metode kontrasepsi yang tersedia saat ini telah memenuhi kriteria-kriteria tersebut diatas, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa KB secara substansial tidak bertentangan dengan ajaran Islam bahkan merupakan salah satu bentuk implementasi semangat ajaran Islam dalam rangka mewujudkan sebuah kemashlahatan, yaitu menciptakan keluarga yang tangguh, mawaddah, sakinah dan penuh rahmah.

⁷⁸Luthfi As-syaukani, *Politik, Ham dan Isu-isu Fiqih Kontemporer* (Cet. II; Pustaka Hidayah:Bandung, 1998), h. 157

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di bidang Pelayanan Publik di laksanakan dan bekerja sama oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan. BKBPP bekerjasama dengan Dinas Kesehatan di bidang Keluarga Berencana (KB) dan program-program yang berkaitan dengan kesehatan seperti pelayanan pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja, pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan program BKBPP berwenang menyediakan Alat dan obat-obatan dan Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan melaksanakan program kerja yang di laksanakan oleh BKBPP dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan memberikan atau membagikan alat kontrasepsi dan menganjurkan keluarga untuk mengkonsumsi pil KB untuk mengatur angka kelahiran anak. Sedangkan Dinas Kependudukan adalah Mengendalikan Laju pertumbuhan penduduk sehingga tidak terjadi kepadatan penduduk di kabupaten Barru.
2. Kewenangan yang diberikan kepada seseorang yang dimana berisi tugas dan tanggung jawab merupakan amanat sangat berat, tanggung jawab timbul karena telah diterima wewenang. Tanggung jawab yang membentuk hubungan tertentu antara pemberi wewenang dan penerima wewenang. Jadi tanggung jawab seimbang dengan wewenang. Dengan demikian kalau terjadi sesuatu maka seseorang yang dibebani tanggung jawab wajib menanggung segala sesuatunya.

B. Implikasi Penelitian

Kepada pemerintah Kabupaten Barru sebaiknya segera bertindak atau memberikan masukan dalam membantu Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Barru di bidang pelayanan publik, karena persoalan di bidang pelayanan publik tidak hanya terbatas pada kerja sama instansi, akan tetapi termasuk juga bantuan dana dari anggaran pendapatan belanja daerah dan kepada masyarakat agar kiranya memperhatikan laju pertumbuhan kelahiran anak agar tercipta keluarga yang sejahtera dan bahagia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Baqi Bin Muhammad Fu'ad. *Hadist Shahih Bukhari Muslim, Himpunan Hadist tershahih Yang Diriwayatkan Oleh Bukhari dan Muslim* Cet. 9: Depok: fathan prima media, 2017
- Abdurrahman, Umran. *Islam dan KB* Cet.I; PT Lentera Basritama: Jakarta, 1997
- AG, Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik* Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Aulia, Evi Fitriyani, *Kekuasaandan Kewenangan*. <https://www.kompasiana.com>. 22 januari 2014
- Astawa, I Gede Fantja dan Suprin Na'a. *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Bandung: Ratika Aditama, 2009.
- As-syaukani, Luthfi. *Politik, Ham dan Isu-isu Fiqih Kontemporer* Cet. II; Pustaka Hidayah: Bandung, 1998.
- Ath- Thabrani, Imam, *Al Mu'jam Ash-Shaghir* Cet.II: Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Az-Zuhaili, Whbah. *Tafsir Al Wasith Alid I Al-Faatihha-At-Taubah* Cet.I. Jakarta:Gema Insani, 2012
- Daniel, moehar. *Metode Penelitian Sosial* Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Fadl Mohsin Ebrahim Abdul. *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan* Mizan: Bandung, 1997.
- Hayat. *Manajemen Pelayanan Publik*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2017.
- Hadjun, Philipus.H. *Tentang Wewenang, Makalah*, Surabaya:Universitas Airlangga, Tampa Tahun.
- Hartato, Hanafi. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Hasaruddin (48 Tahun) Kepala Dinas *Wawancara* Barru 26 Agustus 2018.
- Kamal Musthafa. *Fiqh Islam* Cet.I; Citra Karsa Mandiri: Yogyakarta, 2002
- Kementrian Agama RI, " *Al-Qur'an Terjemahan* " Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahan* Cet. I; Nurul Ilmi Semesta:Bandung, 2013
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Hukum: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah* Jakarta: Kencana, 201.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nogi, Hassel. *Manajemen Publik* Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia: 2005
- Jateng,tribunnews.com. Jumlah Penduduk Indonesia*, 02 Agustus, 2017.
- Meleon, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002

- Mulyo, SudarmoSuwoto. *Kekuasaan dan Tnggung Jawab Presiden Republik Indonesia Suatu Penelitian Segi-segi Teoritik dan Yuridis Pertanggung Jawaban Kekuasaan*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1990.
- Prawirohardjo, Sarwono. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2006.
- Rachmad, Muhammad. *Manajemen Pelayanan Publik Dalam Perspektif Hukum Islam* UIN Sultan Kasim Riau, tanpa judul.
- Ramli, Muhammad. *Manajemen Pelayanan Publik Berbasis Kemanusiaan*. Cet.III Alauddin Unipersity Press, 2015
- Raminto. *Manajemen Pelayanan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Saifuddin, Abdul Bahri. *Buku Pandua Praktis Pelayanan Kontrasepsi* Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo, 2003.
- Setiardja, A. Gunawan. *Dealektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisisus, 1990.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah - Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. 2: Semarang; PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Shomad, ABD. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* Jakarta: Kencana, 2010.
- Sinambella, *Reformasi Pelayanan Publik* Yogyakarta: Bumi Aksara, 2006
- Somad, Abdul. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam* Jakarta: Logos, 2010.
- Stranik, F.A.M. dalam Abdul Rasyid Thalib. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Syarifuddin, Ateng. *Menuju Pelayanan Pemerintah Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, jurnal *Pro Justisia* Edisi IV, Bandung: Universitas parahyangan, 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*.Cet. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Sumadi, Suryabrata. *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: CV.Rajawali, 1985.
- Umran, Abdurrahman. *Islam dan KB* Cet.i: PT Lentera Basritama:Jakarta, 1997
- Wahbah. Az-Zuhaili, *Tafsir Al Wasith Alid I Al-Faatihha-At-Taubah* Cet.1:Jakarta:Gema Insani, 2012
- Widjaja, Haw. *Pelayanan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005.
- www.tribunnews.com *Pertumbuhan Penduduk 5 Tahun Lebih Cepat*, (25 September 2010).
- <http://www.stikesyarsi.ac.id/index.php/artikel-islam/102-pandangan-hukum-islam-tentang-keluarga-berencana-.html> (Diakses pada tanggal 13 Oktober 2018 Pukul 21.50 WIB)

L

A

M

P

I

R

A

N



1. Lokasi Penelitian



2.



3. Wawancara



4. Penyuluhan di Desa Galung



5. Foto bersama Setelah Pelayanan Implant.



6. Baksi Sosial Bhayangkara KB Kesehatan



7. Pertemuan kader di aula kantor BKBPP.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI






PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor: 1573 /HPK/2018

Judul Skripsi: Pelayanan publik pada badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan (BKB dan PP) di Kabupaten Barru perspektif Hukum Islam.

Gowa, 19 Juli 2018

Penyusun,



Akbar Tamrin

Nim.10200114132

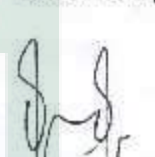
Pembimbing I



Dr. Kurniati, S.Ag., M. Ii

Nip. 19740627 200604 2 002

Pembimbing II

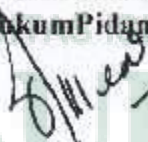


Dr. Musyifah, M.Ii

Nip. 19820118 201411 2 002

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan



Dra. Nila Sastrawati, M. Si

Nip. 19710712199703 2 002

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag

Nip. 196210161990031003

RIWAYAT HIDUP



AKBAR TAMRIN, di lahirkan di (Barru) 28 April 1993, anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan bapak Tamrin dan Ibu Rawiah. Penulisan menempuh pendidikan di mulai dari SD INPRES GALUNG (lulus tahun 2006), melanjutkan ke SMP NEGERI 3 BARRU (lulus tahun 2009) dan SMK NEGERI 1 BARRU (lulus tahun 2012),

dan sekarang menempuh masa kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Program Starata Satu (S1)

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus berjuang dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulisan mengucapkan saya syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas terselesainya skripsi yang berjudul “**Kewenangan Pelayanan Publik Pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) di Kabupaten Barru Perspektif Hukum Islam**”.